DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah Tidak Dipublikasikan

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta : Makalah Tidak Dipublikasikan, 1995.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2000.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

C.S.T. Kancil, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.

Hazewinkel-Suringga dikutip kembali oleh Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003.

J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

Jimly Asshiddiqie "*Badan Hukum*" http://www.jimly.com/pemikiran/view/. diakses tanggal 01 Mei 2013

Kusumadi Pudjosewojo dalam Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

M.M. Van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht, 's-Gravenhage* : Juridischt Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoom, 1950.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2000.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya : Yuridika, 1993.

Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Bandung : Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Semester Ganjil, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pers, 1998.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

_____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987, 24.

Romeyn dikutip kembali oleh A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993.

Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: *Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Yarsif watampone, 1996.

Scholten dikutip kembali oleh Mr.W.F.Prins dan R. Kosim Adisapeotra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: lde Dasar Double Track Sistem & lmplementasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1995.

S.J. Fockema Andreas, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen : Tweede Druk, J. B. Wolter' Uitgevers-maatshappij N. V., 1951.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Spelt. N.M. dan Ten Berge dalam Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana I A*, Semarang : FH UNDIP, 1975.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

_____, *Kapita Sesekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Utrecht dikutip kembali oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Van Bemmelen, Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel, Zesde Herziene Druk, Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 1979.

W.L.G. Lemaire dikutip kembali oleh PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Bagan dan Synopsis Catatan Singkat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

B. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.